



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) *TAHUN 2024*



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LkJIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan serta pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai revisi RENSTRA Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat .

Guna evaluasi pelaksanaan kegiatan ditahun selanjutnya, tentunya dalam penyusunan dokumen ini jauh dari kata sempurna untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dalam menyempurnakan laporan kinerja ini.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk evaluasi sasaran dan program kegiatan ditahun mendatang guna menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun 2019 – 2023, dan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTB pada periode selanjutnya tahun 2024 - 2026.

Mataram, Februari 2025
Plt.Kepala Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi NTB,

Lalu Suryadi, S.P.,MM
Pembina Tk. I/ (IVb) NIP:
196912311998031055

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Iktisar Eksekutif | iv |
| Bab I Pendahuluan | 6 |
| 1.1. Latar Belakang | 6 |
| A. Gambaran Umum | 7 |
| Struktur organisasi | 7 |
| B. Aspek strategis | 30 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 33 |
| A. Perencanaan | 33 |
| 1. Visi dan Misi | 33 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 34 |
| 3. Indikator Kinerja Utama | 34 |
| B. Perjanjian Kinerja | 35 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 37 |
| A. Capaian Kinerja | 38 |
| B. Realisasi Anggaran | 59 |
| Bab IV Penutup | 63 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 66 |

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Gambaran Organisasi
- 1.5 Sistematika Penulisan
- 1.6 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1.7 Dasar Hukum

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026
- 2.2 Rencana Strategis 2024-2026
- 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1.1 Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT” dengan Indikator Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan)

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 3.1.2 Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM” dengan Indikator Persentase Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan

3.1.3 Sasaran Strategis 3 " Meningkatkan perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan social dan inklusi keuangan bagi koperasi dengan Indikator Persentase Koperasi Modern

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.1.4. Sasaran Strategis 4 "Meningkatnyan kemandirian fiskal Koperasi UKM" dengan Indikator Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi)

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.1.5 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

3.1.6 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Anggaran

3.1.7 Realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah langkah dalam rangka peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Perumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Adapun capaian dan realisasi strategis BRIDA NTB pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Target dan Realisasi.

| TUJUAN | SASARAN | 2023 | | |
|---------------|---|--------|--------|-----------|
| | | Target | Satuan | Realisasi |
| TUJUAN | | | | |
| | Terwujudnya Ekosistem Inovasi terintegrasi di Provinsi NTB | 75,67 | point | 76,00 |
| | SASARAN | | | |
| | Terimplementasinya rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah | 34,78 | % | 37,14 |
| | Meningkatnya kapasitas sumber daya iptek daerah | 183,56 | point | 186,56 |
| | Meningkatnya kapasitas wirausaha berbasis inovasi, teknologi & digitalisasi | 24 | % | 30 |

Secara umum seluruh kegiatan yang diprogramkan Tahun 2024 dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari hasil realisasi penyerapan APBD sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Program/kegiatan DPA-APBDP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 39.215.238.237,- atau mencapai 85,03 % dengan perkembangan fisik 86,59%. Sisa anggaran APBD yang tidak dimanfaatkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 56.903.998.537,- atau sebesar 10,60% merupakan hasil efisiensi penggunaan anggaran yang

selanjutnya dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diera keterbukaan saat ini pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel merupakan hal yang wajib untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Asas akuntabilitas mengharuskan seluruh kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 menyatakan, bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : 1) asas kepastian hukum, 2) asas tertib penyelenggaraan negara, 3) asas kepentingan umum, 4) asas keterbukaan, 5) asas proporsionalitas, 6) asas profesionalitas dan 7) asas akuntabilitas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, disamping itu merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang penelitian,

pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual baik kepada Gubernur selaku atasan dan pemberi mandat maupun kepada masyarakat umum (publik).

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yaitu mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan isu-isu strategis dalam Rencana Strategi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini mencakup seluruh pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang dan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah

1.4. Gambaran Organisasi

A. Gambaran Umum

1.4.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi, yang dilaksanakan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB dan berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.

1.4.2. Kepala BRIDA

a. Ringkasan Tugas

Merumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/progra, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Uraian Tugas

- a) Merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan strategis dan teknis serta pembinaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- b) Merumuskan bahan kebijakan dan menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- c) Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- d) Merumuskan bahan kebijakan dan rencana alokasi

- penganggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- e) Mendukung perumusan bahan kebijakan dan menyusun anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- f) Merumuskan bahan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- g) Merumuskan bahan kebijakan dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
- h) Merumuskan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi umum dalam pelayanan publik terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi,

pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;

- i) Merumuskan kerangka regulasi dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- j) Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- k) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi, Lembaga

Penelitian, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual;

- l) Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan dan penelitian pengembangan;
- m) Menyelenggarakan Riset dan Inovasi secara mandiri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga penelitian, Dunia Usaha dan masyarakat;

- n) Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Riset dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- o) Menyelenggarakan fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Informasi Geospasial dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Lembaga terkait lainnya;
- p) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, LKjIP/LAKIP, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Badan;
- q) Merumuskan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- r) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- s) Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- t) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- u) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- v) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

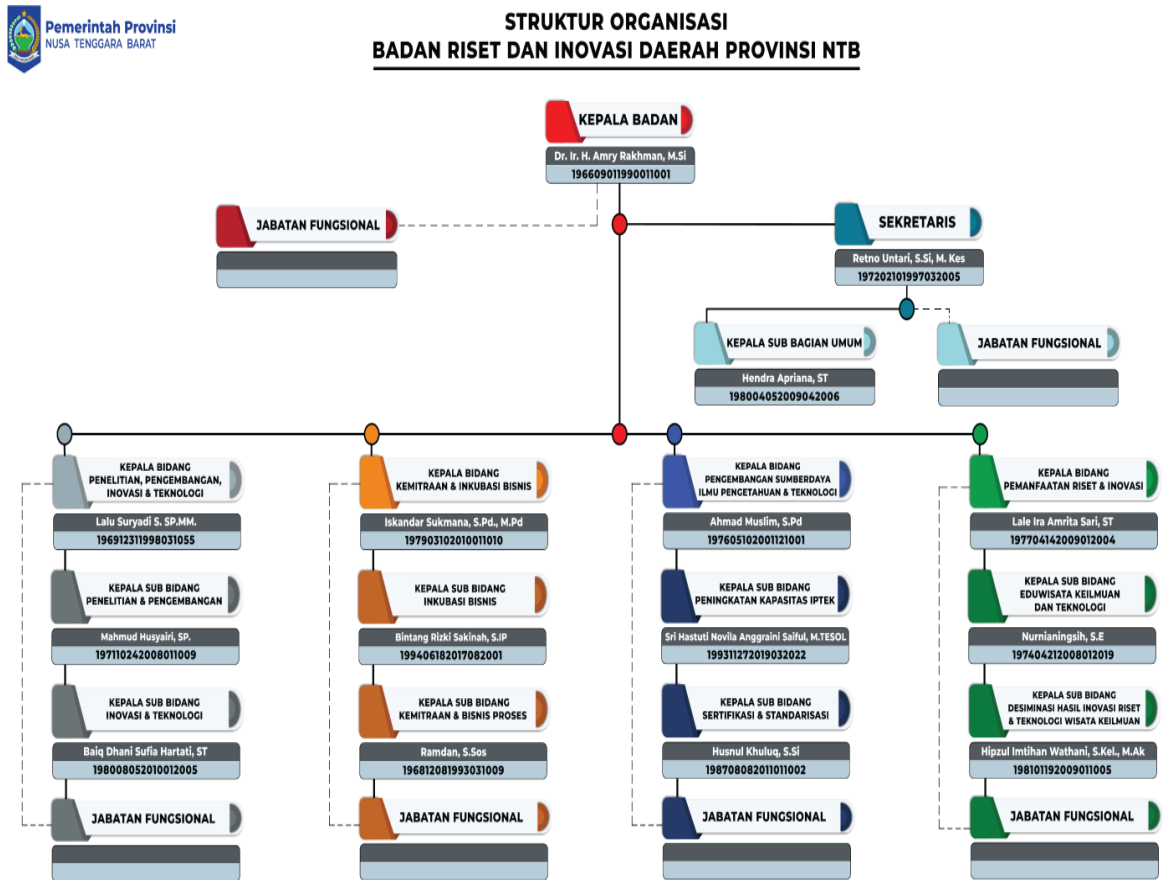
c. Uraian Fungsi

- a) Perumusan dan penetapan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
- b) Perumusan program dan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;

- c) Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
- d) Pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
- e) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
- f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1. (*Status: Januari 2024*)

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov.NTB



B. Keadaan Pegawai dan Sarana Prasarana

a. Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia (SDM) berperan dalam menentukan keberhasilan BRIDA Provinsi NTB dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Saat ini jumlah Pegawai/ Sumber Daya Manusia (SDM) BRIDA Provinsi NTB sebanyak 107 orang terdiri dari 33 ASN dan 74 orang Non ASN (PTT dan tenaga kontrak), seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah PNS dan Non PNS di BRIDA Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian Tahun 2024

| No. | Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan | Status Kepegawaian | |
|-----|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | PNS (orang) | Non PNS (orang) |
| 1. | Doktor (S3) | 1 | |
| 2. | Magister (S2) | 4 | 6 |
| 3. | Sarjana (S1/D4) | 16 | 21 |
| 4. | Diploma (D3, D2, D1) | 3 | 4 |
| 5. | SLTA | 6 | 36 |
| 6. | SLTP | | 3 |
| 7. | Sekolah Dasar | | 3 |
| | Jumlah | 33 | 74 |
| | Total | 107 | |

Sumber: Sub Bagian Umum Brida Provinsi NTB, 2024.

Berdasarkan Tabel 2.2 kualitas SDM BRIDA berdasarkan tingkat pendidikan sangat memadai, dimana pegawai baik ASN dan Non ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebanyak 15 orang, jenjang pendidikan S1 sebanyak 37 orang, Diploma 7 orang dan jenjang SLTA kebawah sebanyak 52 orang. Adapun untuk pegawai ASN Brida Provinsi NTB Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui pegawai BRIDA Provinsi NTB terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 18 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Dengan jumlah dan komposisi SDM yang tersedia, para pegawai diharapkan mampu untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif serta perubahan positif bagi organisasi.

Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi dan lembaga lainnya dan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah

Provinsi NTB adalah dengan melaksanakan pendidikan non formal berupa pendidikan fungsional, struktural dan jabatan dan diklat-diklat teknis tematik lainnya. Pendidikan dan Pelatihan terutama diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas bagi ASN dan Non ASN lingkup BRIDA Provinsi NTB.

Tabel 2.3. Jumlah ASN BRIDA Provinsi NTB Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2024

| No. | Golongan | Jumlah |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 1. | Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 |
| 2. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 0 |
| 3. | Pembina Tingkat I (IV/b) | 2 |
| 4. | Pembina (IV/a) | 2 |
| 5. | Penata Tk I (III/d) | 10 |
| 6. | Penata (III/c) | 3 |
| 7. | Penata Muda Tk. I (III/b) | 6 |
| 8. | Penata Muda (III/a) | 2 |
| 9. | Pengatur Tk. I (II/d) | 3 |
| 10. | Pengatur (II/c) | 2 |
| 11. | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 1 |
| 12. | Pengatur Muda (II/a) | |
| | Total Jumlah | 32 |

Sumber: Sub Bagian Umum BRIDA Provinsi NTB, 2024.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB sampai dengan tahun 2024 terdiri dari.

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov.NTB

| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan |
|----|---------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) | 2 | Unit |
| 2. | Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) | 2 | Unit |
| 3. | Mesin Tik | 6 | Buah |
| 4. | Lemari Arsip | 8 | Buah |
| 5. | Meubelair | 97 | Buah |
| 6. | Peralatan Komputer, Personal Komputer | 4 | Unit |
| 7. | Alat Komunikasi | 1 | Unit |

| | | | |
|----|-----------------------|---|------|
| | | | |
| 8. | Air Condition (AC) | 6 | Unti |
| 9. | Lemari Besi / Brankas | 1 | Unit |

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Gambaran Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan
- 1.6. Permasalahan dan Isu Strategis
- 1.7. Dasar Hukum

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026
- 2.2. Rencana Strategis 2024-2026
- 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1.1 Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT” dengan Indikator Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan)

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 3.1.3 Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM” dengan Indikator Persentase Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan

3.1.3 Sasaran Strategis 3 ” Meningkatkan perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan social dan inklusi keuangan bagi koperasi dengan Indikator Persentase Koperasi Modern

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.1.4. Sasaran Strategis 4 “Meningkatnyan kemandirian fiskal Koperasi UKM” dengan Indikator Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi)

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.1.5 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

3.1.7 Realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah langkah dalam rangka peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1.2. Permasalahan dan Isu Strategis

1.3. Dasar Hukum

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB merupakan laporan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan, yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. LKjIP disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut:

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

B. Kinerja Pelayanan BRIDA NTB

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan. Secara kelembagaan bertanggung jawab merumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai perwujudan Visi – Misi Pemerintah NTB dilakukan melalui berbagai jenis pelayanan dan kelompok sasaran berdasarkan program unggulan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Table 2.4. kinerja pelayanan BRIDA NTB

| No. | Bidang / Balai | Jenis Pelayanan | Kelompok Sasaran |
|-----|--|---|---------------------------|
| 1 | SEKRETARIAT | Penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran meliputi : | 1. Karyawan lingkup BRIDA |
| | | 1 Penyusunan Program dan pelaporan, | 2. OPD terkait |
| | | 2 Peningkatan disiplin sumberdaya aparatur, | |
| | | 3 Administrasi Keuangan, umum dan Aset. | |
| 2 | BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI | 1 Fasilitasi Kajian/Riset Daerah | 1. Seluruh OPD |
| | | 2 Fasilitasi Ijin Penelitian | 2. Masyarakat NTB, |
| | | 3 Pembuatan Prototype Permesinan | 3. Dunia Usaha |
| | | 4 Fasilitasi Inovasi Daerah | |
| | | 5 Fasilitasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | | 6 Fasilitasi Kerjasama dengan stakeholder (DRD, GTM, SII Kedutaan Denmark, dll) | |
| 3 | BIDANG KEMITRAAN DAN INKUBASI BISNIS | 1 Pelaksanaan Program Inkubasi Bisnis | 1. Masyarakat NTB |
| | | 2 Fasilitasi Tenan Inkubasi Bisnis | 2. Dunia usaha |
| | | 3 Fasilitasi Kemitraan | 3. Mahasiswa dan Pelajar |
| | | 4 Pelayanan Pemanfaatan Aset | 4. Guru dan Akademisi |
| 4 | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 1 Pelaksanaan Program Beasiswa NTB | 1. Masyarakat NTB |
| | | 2 Pelaksanaan Program Rumah Bahasa | 2. Dunia usaha |
| | | 3 Pelaksanaan Program Brida School Academy | 3. OPD terkait |
| | | 4 Uji Kompetensi Profesi | |
| | | 5 Standarisasi dan Sertifikasi Produk | 4. Dunia usaha |
| 5 | BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI | 1 Wisata Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan | 1. OPD terkait |
| | | 2 Meningkatkan Jumlah Kunjungan | 2. Masyarakat NTB |

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| | | 3 Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Riset dan Inovasi | 3. Dunia Usaha |
| | | 4 Penyusunan Data Hasil Riset dan Inovasi | |

C. Isu Strategis dan Permasalahan Utama

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BRIDA sebagai berikut:

- 1) Ekosistem Penelitian dan Inovasi belum terintegrasi
- 2) Hasil kajian kelitbangan belum maksimal dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan.
- 3) Pemanfaatan teknologi dan inovasi belum maksimal.
- 4) Kompetensi Sumber daya manusia belum maksimal.

1.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, isu strategis yang terkait dengan pelayanan BRIDA NTB yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal, yang didalamnya terdapat fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Mutu dan Daya Saing Proses dan Hasil Pendidikan Belum Optimal dimana Fasilitas aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah;
3. Pertumbuhan Pertanian/Agribisnis dan Investasi relatif lambat, ditandai diantaranya oleh Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang.

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan penunjang pada fungsi perencanaan maupun fungsi penelitian dan pengembangan, serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi NTB. Isu-isu strategis BRIDA Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dan inovasi teknologi dalam pembangunan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya iptek mendukung pembangunan daerah.
3. Optimalisasi inkubasi StartUP berbasis Teknologi Informasi/Digitalisasi mendukung Industri 4.0.
4. Masih rendahnya peran sumber daya aparatur peneliti.
5. Belum optimalnya pemanfaatan aset Brida

BAB II PERENCANAAN KINERJA

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

BRIDA Provinsi NTB memiliki tanggung jawab menjalankan ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dimulai dari penelitian/kajian yang menghasilkan baik berupa rumusan kebijakan atau produk yang dapat dikembangkan menjadi suatu inovasi bahkan dapat dikomersialisasikan. Disamping itu BRIDA NTB menjadi pusat lahirnya StartUP atau digital enterpreneur berbasis inovasi/Teknologi Informasi/IPTEK yang mampu membangkitkan perekonomian dengan industrialisasi, digitalisasi dan pembukaan lapangan kerja baru.

Tabel 4.1. Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| 1. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT) | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) | Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghadapi situasi Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA) | Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan |
| 2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH | Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor | Peningkatan Daya Saing Daerah | Peningkatan Inovasi Daerah |

4.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Daya Saing Daerah yang merupakan salah satu tujuan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB, dengan sasarannya adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Meningkatkan Kapabilitas Inovasi. Peningkatan kualitas SDM masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui Pendidikan Beasiswa. Sedangkan Inovasi merupakan semua bentuk pembaharuan pengembangan, Pengetahuan teknologi yang memiliki manfaat berarti bagi masyarakat luas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sasaran yang tertuang dalam

dokumen RPD Provinsi NTB tersebut menjadi tujuan pada Rencana Strategis BRIDA Provinsi NTB. Adapun indikator dalam tujuan tersebut adalah Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB dan yang kedua yaitu Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri.

Tujuan dan Sasaran BRIDA Provinsi NTB telah disusun sebaik mungkin, salah satunya dengan mempertimbangan kondisi-kondisi tertentu seperti Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi pada BRIDA, Telaahan Visi/Misi dan Program Kepala Daerah. Dengan telah dilaksanakannya perumusan dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut maka, disusunlah Tujuan dan Sasaran BRIDA Provinsi NTB dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran BRIDA Provinsi NTB Tahun 2024-2026

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Target | | |
|----|---|--|-------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | TUJUAN | | | | | | | |
| | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (Kuat) | | | | | | | |
| | SASARAN | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) | Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB | Point/ Persen (%) | 180,56 | 186,56 | 92,05% | 92,05% | 88,80 % |
| | Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah | | | | | | | |
| | SASARAN | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri | Jumlah Inovasi dan Diterapkan dalam Skala Industri | Point/ unit | 76,00 | 76,56 | *NA | *NA | 80point |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, 2024

*Keterbatasan anggaran

4.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4. 3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum

| No. | Bidang / Balai | Jenis Pelayanan | Kelompok Sasaran |
|-----|----------------|--|---------------------------|
| 1 | SEKRETARIAT | Penyediaan sarana dan prasarana administrasi | 3. Karyawan lingkup BRIDA |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | perkantoran meliputi : | |
| | | 1 Penyusunan Program dan pelaporan, | 4. OPD terkait |
| | | 2 Peningkatan disiplin sumberdaya aparatur, | |
| | | 3 Administrasi Keuangan, umum dan Aset. | |
| 2 | BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI | 1 Fasilitasi Kajian/Riset Daerah | 4. Seluruh OPD |
| | | 2 Fasilitasi Ijin Penelitian | 5. Masyarakat NTB, |
| | | 3 Pembuatan Prototype Permesinan | 6. Dunia Usaha |
| | | 4 Fasilitasi Inovasi Daerah | |
| | | 5 Fasilitasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | | 6 Fasilitasi Kerjasama dengan stakeholder (DRD, GTM, SII Kedutaan Denmark, dll) | |
| 3 | BIDANG KEMITRAAN DAN INKUBASI BISNIS | 1 Pelaksanaan Program Inkubasi Bisnis | 5. Masyarakat NTB |
| | | 2 Fasilitasi Tenan Inkubasi Bisnis | 6. Dunia usaha |
| | | 3 Fasilitasi Kemitraan | 7. Mahasiswa dan Pelajar |
| | | 4 Pelayanan Pemanfaatan Aset | 8. Guru dan Akademisi |
| 4 | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 1 Pelaksanaan Program Beasiswa NTB | 5. Masyarakat NTB |
| | | 2 Pelaksanaan Program Rumah Bahasa | 6. Dunia usaha |
| | | 3 Pelaksanaan Program Bida School Academy | 7. OPD terkait |
| | | 4 Uji Kompetensi Profesi | 8. Perguruan Tinggi /Institusi/ Lembaga Pendidikan dalam dan Luar negeri |
| | | 5 Standarisasi dan Sertifikasi Produk | 9. Pemerintah Pusat/ Pemerintah Luar Negeri Negara Tujuan |
| 5 | BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI | 1 Wisata Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan | 4. OPD terkait |
| | | 2 Meningkatkan Jumlah Kunjungan | 5. Masyarakat NTB |
| | | 3 Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Riset dan Inovasi | 6. Dunia Usaha |
| | | 4 Penyusunan Data Hasil Riset dan Inovasi | |

4.4. Rencana Kerja Serta Target Dan Pendanaannya

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Badan Riset dan Inovasi

Daeah (BRIDA) Provinsi NTB. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Rencana program dilengkapi dengan outcome beserta target capaiannya dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output beserta target capaiannya dan pagu indikatif. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Rencana Kerja memuat dokumen yang akan dilaksanakan tahun berikutnya yang disusun pada Tahun Anggaran berjalan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ditetapkan pada tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, disertai indikator dan pendanaannya. Pedoman penyusunan Renja didasarkan pada Renstra Bappeda 2024-2026 dan RKPD Provinsi NTB Tahun 2024. Terkait program dan kegiatan pada Renstra BRIDA, terdapat 2 (dua) Program tahun 2024 yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.
- b. Program Penelitian dan Pengembangan.

Kerangka pendanaan indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BRIDA Provinsi NTB Periode 2024 disajikan pada tabel 6.1. berikut;

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB
Periode Tahun 2024**

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Target RENJA Tahun 2024 | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|----|----|------|------|--|---|---------------------------------|-----------|---------------------|--|-----------------------------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | Target 2024 | | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | Satuan | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | RKPD 2024 | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.080.000,00 | | Dokumen | | 50.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 50.000.000,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.080.000,00 | | Dokumen | | 50.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.080.000,00 | | Dokumen | | 50.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Dokumen | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|-----------|-----------|-------------------|--|----------|-------------------|
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.080.000,00 | | Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.080.000,00 | | Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-----------|-------------------|--|---------|--|-------------------|
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Laporan | | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.080.000,00 | | Meningkat nya kualitas perencanaa n, penganggar an, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | 50.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-------------------|--|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.080.000,00 | | Dokumen | | 50.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Laporan | | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.080.000,00 | | Dokumen | | 50.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.032.384.531,00 | | 12 Bulan | 7.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/Bulan | 12 Orang/Bulan | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Orang/Bulan | 7.000.000.000,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.032.384.531,00 | | 12 Bulan | 7.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-------------------|--|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.032.384.531,00 | | 12 Bulan | | 7.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Dokumen | | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.032.384.531,00 | | 12 Bulan | | 7.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-------------------|--|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.032.384.531,00 | | 12 Bulan | | 7.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Laporan | | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.032.384.531,00 | | 12 Bulan | | 7.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Pelayanan administrasi perkantoran optimal | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.287.581.781,00 | | Laporan | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pelayanan administrasi perkantoran optimal | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | | Laporan | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Laporan | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Pelayanan administrasi perkantoran optimal | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.287.581.781,00 | | Laporan | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pelayanan administrasi perkantoran optimal | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | | Laporan | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Pelayanan administrasi perkantoran optimal | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.287.581.781,00 | | Laporan | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pelayanan administrasi perkantoran optimal | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | | Laporan | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Laporan | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Pelayanan administrasi perkantoran optimal | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.287.581.781,00 | | Laporan | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pelayanan administrasi perkantoran optimal | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | | Laporan | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 100.500.000,00 | | BB Nilai | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Orang | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 100.500.000,00 | | BB Nilai | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Paket | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | | 2.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Paket | | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | | 2.000.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Paket | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Paket | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Laporan | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Laporan | 1.000.000.000,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | 2.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Laporan | 1.000.000.000,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persesentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah | BB Kategori | BB Kategori | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat Daerah | BB Kategori | BB Kategori | 1.355.705.250,00 | | BB Nilai | | 2.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | Unit | | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Unit | | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | Unit | | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | Unit | | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana | Unit | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|----------|----------|-------------------|--------------|----------|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | Alokasi Umum | | | | |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 | |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | Unit | | 0,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 | |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | Unit | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|----------|----------|-------------------|--------------------------------------|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Unit | | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | Unit | | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | Unit | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|----------|----------|-------------------|--------------------------------------|----------|--|-------------------|
| | | | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendukung Industrialisasi | | | | | | | |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Unit | | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | Unit | | 0,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|--|-------------------|
| | | | | | DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.628.912.000,00 | | 12 bulan | | 4.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Laporan | | 1.000.000.000,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.628.912.000,00 | | 12 Bulan | | 4.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-------------------|--|-----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.628.912.000,00 | | 12 Bulan | | 4.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1 Laporan | | 3.000.000.000,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | BB Nilai | BB Nilai | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.628.912.000,00 | | 12 Bulan | | 4.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|----------|--------|-------------------|--|----------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 4 Unit | - | 108.000.000,00 | | Unit | | 500.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Unit | | 500.000.000,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 4 Unit | - | 108.000.000,00 | | Unit | | 500.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|----------|--------|-------------------|--|----------|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 4 Unit | - | 108.000.000,00 | | 4 Unit | 500.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 0 Unit | 0,00 |
| 5 | | | | | NON URUSAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | 21.047.527.681,00 | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | BB Nilai | - | 9.287.581.781,00 | | BB Nilai | 13.550.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|------------|------------|-------------------|---|---------|--|-------------------|
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 4 Unit | - | 108.000.000,00 | | Unit | | 500.000.000,00 |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 21.047.527.681,00 | | | | 28.550.000.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | 11.759.945.900,00 | | Inovasi | | 15.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Inovasi | 90 inovasi | 90 inovasi | 200.000.000,00 | | inovasi | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 200.000.000,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Dokumen | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan | 6 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 0,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rekomendasi | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Laporan | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.922.446.500,00 | | Dokumen | | 15.000.000.000,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 200.011.300,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Dokumen | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 1-12 Dokumen | 1-12 Dokumen | 10.459.935.200,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | dokumen | | 15.000.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--|--|------|
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 150.000.000,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | 1-2 Laporan Dokumen | 1-2 Laporan Dokumen | 112.500.000,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 299.999.400,00 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 150.000.000,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Dokumen | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|-----------|-----------|----------------|-------------------------------|---------|--|------|
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 149.999.400,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Dokumen | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Dokumen | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Dokumen | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Dokumen | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-----------|--|------|
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Dokumen | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi | 20,22 prototype | 20,22 prototype | 337.500.000,00 | | Prototype | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1-2 Laporan Laporan | 1-2 Laporan Laporan | 112.500.000,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Laporan | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Laporan | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|--|---------|--|------|
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT) | Laporan | | 0,00 |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1-2 Laporan Laporan | 1-2 Laporan Laporan | 75.000.000,00 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Laporan | | 0,00 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada ketentuan Pasal 18 disebutkan, bahwa setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran dan sumberdaya terkait pelaksanaan amanah yang diemban. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui laporan ini, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran tentang tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Dengan adanya laporan kinerja setiap tahunnya dapat menggambarkan trend yang dihadapi oleh setiap OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis serta permasalahan yang dihadapi. ketersediaan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dalam rangka perbaikan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1.1. Capaian kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Daya Saing Daerah yang merupakan salah satu tujuan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024–2026, dengan sasarannya adalah Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan Meningkatnya Kapabilitas Inovasi. Peningkatan kualitas SDM masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui Pendidikan Beasiswa. Sedangkan Inovasi merupakan semua bentuk pembaharuan pengembangan, Pengetahuan teknologi yang memiliki manfaat berarti bagi masyarakat luas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Provinsi NTB tersebut menjadi tujuan pada Rencana Strategis BRIDA Provinsi NTB. Adapun indikator dalam tujuan tersebut adalah Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB dan yang kedua yaitu Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri. Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB dan capaian kinerjanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTB Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis (sesuai PK Eselon II) | Indikator Bidang Urusan | Kondisi awal 2023 | Target akhir Renstra Tahun 2026 | Tahun 2024 | | Tingkat Capaian | |
|----|---|--|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Terhadap Target 2024 | Terhadap Target Akhir Renstra |
| 1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) | Persentase Peningkatan Penerima Beasiswa NTB | 186,56 point | 88,80 % | 15% | -57% | 92,05 % | 15% |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 2 | Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri | Jumlah Inovasi dan Diterapkan dalam Skala Industri | 76,00 point | 80 point | 25 unit | 85 unit | 85 unit | 25 unit |
|---|---|--|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, 2024

- 1. realisasi pada indikator persentase peningkatan penerima beasiswa NTB pada tahun 2024 mengalami penurunan karena :
 (a) terdapat sejumlah awardee luar negeri yang telah menyelesaikan pendidikannya (pulang),
 (b) tidak adanya seleksi beasiswa stimulan unggulan (BSU) pada tahun 2024 karena tidak tersedianya anggaran untuk BSU tersebut
- 2. Realisasi pada Indikator Jumlah Inovasi dan Diterapkan dalam Skala Industri sebanyak 8 unit (Inovasi yang sudah diterapkan pada Tahun 2024 sejumlah 85 unit (60,28 %) dari total inovasi 141 inovasi.

Berdasarkan tabel diatas, Perubahan sasaran strategis dan target indikator kinerja tahun 2024 pada capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penyesuaian dengan sasaran dan indikator tahun 2022-2023. Penetapan ini didasari oleh adaptasi atas dinamika dan tantangan yang muncul, termasuk hasil evaluasi dari tahun sebelumnya.

Sasaran strategis peningkatan kualitas SDM NTB yang Kompetitif, Unggul, Andal, dan Taqwa menuntut upaya maksimal dari semua stakeholder untuk menciptakan individu dan masyarakat yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara melalui Pendidikan dan Beasiswa NTB dengan meningkatnya kualitas SDM NTB yang kompetitif dan diukur melalui indikator kinerja persentase peningkatan penerima Beasiswa NTB dengan capaian kinerja 15% pada Tahun 2024, jika dibandingkan dengan sebelum perubahan target pada tahun 2023 yaitu pada sasaran strategis Meningkatkan kapasitas sumber daya IPTEK daerah dengan indikator bidang urusan Rasio kapasitas sumberdaya IPTEK daerah dan capaian target 186,56 point dan realisasi terpenuhi 100%. Sedangkan tahun 2024 pada sasaran meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dengan indikatornya Jumlah Inovasi dan diterapkan dalam skala Industri yang ditetapkan oleh BRIDA provinsi NTB bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang dapat **meningkatkan inovasi dan daya saing industri lokal, khususnya dalam konteks ekspor**, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dipandang sebagai kunci untuk mencapai tujuan ini, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pengukuran melalui indikator kinerja dengan jumlah inovasi dan diterapkan dalam Skala Industri, dengan target pada tahun 2024 yaitu 25 unit. **Namun dengan keterbatasan anggaran realisasi pada tahun 2024 tidak terpenuhi.**

Berikut capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan berdasarkan PK Eselon 3 dan 4 pada Badan Riset

dan Inovasi Daerah Provinsi NTB Tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 3. 1.Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK Eselon 3 dan 4) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan | Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja | | | Permasalahan | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---|--|--|------------|------------|--------------|--------------------------------|
| | | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | |
| 1 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | |
| | Terimplementasinya rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 laporan | 3 laporan | | |
| | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Inovasi | 25 Inovasi | 85 Inovasi | | |
| | | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan baru | 6 dokumen | 6 dokumen | | |
| | | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Jumlah laporan atas data dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi dan dievaluasi | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | Meningkatnya kapasitas sumber daya IPTEK daerah | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 5 laporan | 5 laporan | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang | 6 kajian | 6 kajian | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------|-------------|---|-----------|
| | | | tersusun | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Awardee Beasiswa NTB | 184 orang | 184 Orang | Jumlah total awarde 2019-2024 = 779 Orang | Terlampir |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Kunjungan Eduwisata | 4.000 orang | 9.649 Orang | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | tenaga kerja yang disertifikasi | 10 orang | 10 Orang | | |
| | Meningkatnya kapasitas wirausaha berbasis inovasi, teknologi dan digitalisasi | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | laporan penelitian dan pengembang bidang ekonomi dan pembangunan | 1 laporan | 1 laporan | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | | Pengembangan Inovasi dan | laporan Pengembangan Inovasi dan | 1 laporan | 1 laporan | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
| | | Teknologi | Teknologi | | | | |
| | | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi | 8 unit | 8 unit | | |
| | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Laporan Desiminasi | 1 dokumen | 1 dokumen | | |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, 2024

A. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Beasiswa NTB)

Capaian pelaksanaan Program Beasiswa NTB sampai dengan akhir Tahun 2024 diperkirakan tercapai sebesar 15%. Selama tahun 2024 terdapat sejumlah 112 orang awardee Beasiswa NTB untuk jenjang S2 dan S3 yang pembiayaan dianggarkan pada tahun 2024 (mahasiswa ongoing) tujuan Polandia, Malaysia, dan Taiwan. Sampai dengan bulan Oktober 2024, dari 112 orang total awardee S2 dan S3 ongoing, 104 orang sudah menyelesaikan studinya dan 5 orang diantaranya akan selesai sampai bulan desember 2024. Adapun 3 orang mahasiswa S3 akan selesai pada tahun 2025.

Pemerintah Provinsi NTB telah bekerjasama dengan Institut Ilmu Keseharan Bhakti Wiyata (IIK), Kediri sejak tahun 2022. IIK memberikan kuota Beasiswa Merdeka untuk Indonesia Timur berupa gratis biaya pendidikan, sementara Pemerintah Provinisi NTB hanya menyediakan tiket keberangkatan. Pada tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Provinsi NTB telah mengirim 31 mahasiswa ke IIK dan pada tahun 2024 IIK menerima mahasiswa NTB sebanyak 29 mahasiswa dan telah memulai studinya sejak Agustus 2024. Sedangkan kerjasama dengan kampus Al-bukhary Internasional University (AIU) Malaysia memberikan Beasiswa kepada masyarakat NTB. AIU Malaysia menanggung komponen Biaya pendidikan, Asrama, Uang Bulanan adapun pemerintah Provinsi hanya menanggung biaya seleksi dan biaya pengiriman termasuk tiket dan Visa. Pada tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Provinsi NTB telah mengirimkan 50 orang mahasiswa dan saat ini sedang berstudi di AIU. Adapun tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTB melalui BRIDA akan mengirimkan Kembali 24 orang mahasiswa yang telah diseleksi dan lulus tes untuk mendapatkan Beasiswa AIU. Tahapan pelaksanaan beasiswa AIU s/d saat ini sebagai berikut:

- Awardee telah mengajukan EMGS students' visa dan saat ini sedang menunggu penerbitannya sebagai syarat untuk mengajukan single entry visa ke malaysia. (estimasi waktu minggu pertama bulan november)

- Gala dinner untuk 24 orang awardee dan masing-masing orang tua bersama Pj. Gubernur satu minggu sebelum keberangkatan, tentativ diagendakan awal akhir November/awal Desember.
- Pemberangkatan 24 Awardee dan Penerimaan oleh Kampus di AIU Malaysia sekitar 8-10 Desember.
- Pengurusan izin Kemendagri Tim dari BRIDA NTB untuk pendampingan keberangkatan mahasiswa (Izin Mulai Diurus akhir Oktober).

Sedangkan untuk beasiswa dalam Negeri **pada tahun 2024** terdapat **Beasiswa Miskin Berprestasi (BMB NTB)** yaitu beasiswa yang diberikan kepada masyarakat miskin dan berprestasi melalui hasil seleksi untuk mengikuti perguruan tinggi swasta di dalam Provinsi NTB. Terdapat 608 mahasiswa tersebar di 21 perguruan tinggi swasta di NTB. Selain BMB **Program Beasiswa Stimulan Kerjasama (BSK) tahun 2024** diberikan juga pada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan D1, D2, D3, D4, S1, S2 dan S3 pada perguruan tinggi dalam negeri berdasarkan kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi NTB. Program BSK tahun anggaran 2024 merupakan beasiswa yang diberikan melalui dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB. Setiap dewan mengusulkan nama penerima beasiswa sesuai dengan besaran dana aspirasi mereka. Saat ini terdapat 17 perguruan tinggi yang akan menerima program BSK dimana 4 kampus diantaranya belum memiliki kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Provinsi NTB. Adapun tahapan pelaksanaan program BSK tahun 2024 sebagai berikut:

- Setiap perguruan tinggi mengusulkan permohonan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait beasiswa BSK tahun 2024.
- Pembahasan MoU untuk 4 kampus yang belum dan pembahasan Perjanjian Kerjasama beasiswa antara Biro Pemerintahan, Perguruan Tinggi Dan Brida NTB
- Pembuatan SK Gubernur tentang penerima BSK tahun anggaran 2024
- Pencairan dana beasiswa

Capaian Beasiswa NTB Dalam Negeri periode Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut;

Tabel Capaian Beasiswa NTB Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024

| No | Beasiswa Dalam Negeri | Tahun | | | | | Jumlah |
|---------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | BMB | 331 | 337 | - | - | - | 668 |
| 2 | BSK | 490 | 562 | 439 | 676 | 430 | 2.597 |
| 3 | BSU | - | 662 | 1030 | 1108 | - | 2.800 |
| Jumlah | | 821 | 1561 | 1469 | 1784 | 430 | 6.065 |

Berdasarkan tabel diatas capaian program beasiswa dalam negeri untuk dari tahun 2020-2024 yang dikhususkan bagi mahasiswa. Pada tahun 2024 capaian pelaksanaan program beasiswa dengan kategori **Beasiswa Miskin Berprestasi (BMB)**: Program ini memiliki kuota sebanyak 668 orang. Beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik tetapi berasal dari keluarga yang kurang mampu dan **Beasiswa Stimulan Kerjasama (BSK)**: Beasiswa ini menyediakan kuota untuk 400 orang. Kategori ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa pada perguruan tinggi dalam negeri berdasarkan kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi NTB. Program BSK tahun anggaran 2024 merupakan beasiswa yang diberikan melalui dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB. Setiap dewan mengusulkan nama penerima beasiswa sesuai dengan besaran dana aspirasi mereka.

B. Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Capaian Pelaksanaan inovasi pada tahun ini kami berkomitmen agar bisa mempertahankan predikat yang melekat tersebut yaitu provinsi terinovatif, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTB melalui Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi (BRIDA) Provinsi NTB melakukan langkah cepat. Strategi yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Percepatan Inovasi Daerah Provinsi NTB, mengadakan sosialisasi dan turun langsung ke Perangkat Daerah untuk mendata inovasi yang dimiliki, SMKN se Provinsi NTB, BUMD, dan beberapa Desa Wisata yang menjadi Bagian dari 99 Desa Wisata yang ada di Provinsi NTB dan Tim Percepatan Inovasi BRIDA Provinsi NTB juga melakukan jemput data dimana tim melakukan identifikasi inovasi yang dapat di laporkan yaitu inovasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, memfasilitasi perangkat daerah untuk melengkapi 20 dokumen pendukung setiap inovasi.

Berikut grafik usulan inovasi dari tahun 2020-2024 dan predikat yang diterima Pemerintah Provinsi NTB.



Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil mengidentifikasi sebanyak 211 inovasi yang berasal dari berbagai inovator. Dan **Inovasi yang telah terkirim ke Kemendagri sejumlah 141 inovasi terdiri dari** inovasi digital sebanyak 28 inovasi dan non digital sebanyak 113 inovasi.

Distribusi inovasi berdasarkan inovatornya adalah sebagai berikut:

1. **Aparatur Sipil Negara (ASN):** Terdapat **13 inovasi** yang diusulkan oleh ASN. Inovasi ini biasanya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam lingkup pemerintahan daerah.
2. **Kepala Daerah:** Kepala Daerah telah memperkenalkan **14 inovasi**. Inovasi dari Kepala Daerah sering kali berfokus pada pelatihan, kebijakan baru, dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
3. **Masyarakat:** Terdapat **43 inovasi** yang berasal dari partisipasi masyarakat. Inovasi ini mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan publik serta cara-cara baru dalam meningkatkan kualitas kehidupan bersama.
4. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD):** OPD memiliki kontribusi paling besar dengan **141 inovasi**. OPD berperan penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan serta program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga inovasi mereka kerap kali mencakup berbagai aspek pelayanan publik, administrasi, serta pengelolaan informasi.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilaksanakan di Provinsi NTB melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, di mana setiap kelompok membawa idenya sendiri untuk meningkatkan layanan dan efektivitas pemerintahan. Setiap jenis inovasi memiliki karakteristik yang unik dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 Kategori Provinsi;

| NO | DAERAH | NILAI | PREDIKAT |
|----|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | Provinsi Sumatera Barat | 89,90 | Sangat Inovatif |
| 2 | Provinsi Jawa Timur | 87,23 | Sangat Inovatif |
| 3 | Provinsi Jawa Barat | 81,27 | Sangat Inovatif |
| 4 | Provinsi DKI Jakarta | 80,18 | Sangat Inovatif |
| 5 | Provinsi Sumatera Selatan | 75,79 | Sangat Inovatif |
| 6 | Provinsi Jawa Tengah | 72,85 | Sangat Inovatif |
| 7 | Provinsi Bali | 69,92 | Sangat Inovatif |
| 8 | Provinsi Lampung | 65,50 | Sangat Inovatif |
| 9 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 63,40 | Sangat Inovatif |
| 10 | Provinsi Kalimantan Timur | 61,74 | Sangat Inovatif |

Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 Kategori Kabupaten/Kota

| NO | DAERAH | NILAI | RANKING | PREDIKAT |
|----|-------------------------|-------|---------|-----------------|
| 1 | Kota Bima | 76,65 | 9 | Sangat Inovatif |
| 2 | Kota Mataram | 71,57 | 15 | Sangat Inovatif |
| 3 | Kabupaten Dompu | 67,43 | 37 | Sangat Inovatif |
| 4 | Kabupaten Lombok Tengah | 60,01 | 69 | Sangat Inovatif |
| 5 | Kabupaten Sumbawa Barat | 58,97 | 81 | Inovatif |
| 6 | Kabupaten Lombok Utara | 54,99 | 123 | Inovatif |
| 7 | Kabupaten Lombok Barat | 50,26 | 161 | Inovatif |
| 8 | Kabupaten Lombok Timur | 48,84 | 171 | Inovatif |
| 9 | Kabupaten Sumbawa | 31,16 | 324 | Kurang Inovatif |
| 10 | Kabupaten Bima | 18,10 | 354 | Kurang Inovatif |

Kendala yang ditemukan selama penginputan inovasi daerah adalah kurangnya informasi dan pemahaman terkait kegiatan inovasi daerah beserta parameter indikator yang dibutuhkan untuk proses penilaian inovasi. Sosialisasi terkait Inovasi Daerah diperlukan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah untuk mengenalkan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Dengan tersebarnya informasi hingga ke masyarakat diharapkan berdampak pada hasil yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Bentuk pembinaan yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terkait inovasi daerah antara lain forum komunikasi, bimbingan teknis, fasilitasi kebijakan inovasi daerah, dan pendampingan terkait proposal maupun indikator inovasi.

Tabel 3. 2.

Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang
Penelitian dan Pengembangan Inovasi Tahun 2024

| PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|
| 1. Ekosistem Penelitian dan Inovasi belum terintegrasi. 2. Hasil kajian kelitbangan belum maksimal dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan. 3. Pemanfaatan teknologi dan inovasi belum maksimal. 4. Kompetensi Sumber daya manusia belum maksimal. | 1. Perlu penguatan dari ketersediaan regulasi pendukung dari segi penelitian, 2. Dukungan komitmen stakeholder terkait dalam pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan, 3. Peningkatan sosialisasi dan edukasi baik normal dan non formal terhadap pemanfaatan teknologi yang dihasilkan, 4. Peningkatan kompetensi SDM dengan Diklat Pendidikan dan Pelatihan melalui Program Beasiswa NTB. |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan

Target dan Capaian Indikator Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK)
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR BIDANG URUSAN | TAHUN 2023 | |
|----|---|---|------------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | Terimplementasinya rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah | Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah | 34,78% | 34,78% |

| | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|
| 2 | Meningkatnya kapasitas sumber daya IPTEK daerah | Rasio kapasitas sumberdaya IPTEK daerah | 183,56 point | 183,56 point |
| 3 | Meningkatnya kapasitas wirausaha berbasis inovasi, teknologi dan digitalisasi | Persentase Wirausaha wirausaha berbasis inovasi, teknologi, dan digitalisasi | 24% | 24% |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, 2023

1.2. Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, pada RPJMD 2019-2023 mengemban tugas untuk mencapai 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah, yakni Terimplementasinya Rekomendasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya IPTEK Daerah dan Meningkatnya Kapasitas Wirausaha Berbasis Inovasi Teknologi dan Digitalisasi. Pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja daerah ini pada tahun 2023 telah mencapai target.

Tabel 3. 2. Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK Eselon 3 dan 4) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

| No | SASARAN STRATEGIS | URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN | SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA | | | PERMA SALAH AN | TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD |
|----|---|--|---|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| | | | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISA SI | | |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | |
| | Terimplementasinya rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | laporan Penelitian dan Pengembanga n Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengakian Peraturan | 3 laporan | 3 laporan | | |
| | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Inovasi | 129 Inovasi | 134 Inovasi | | |
| | | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan baru | 10 dokumen | 10 dokumen | | |
| | | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Jumlah laporan atas data dan Pengkajian Peraturan yang | 1 dokumen | 1 dokumen | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------|--------------|--|-----------|
| | | | difasilitasi dan dievaluasi | | | | |
| | Meningkatnya kapasitas sumber daya IPTEK daerah | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 5 laporan | 5 laporan | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang tersusun | 16 kajian | 16 kajian | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Awardee Beasiswa NTB | 820 orang | 2.235 Orang | | Terlampir |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Kunjungan Eduwisata | 3.000 orang | 11.093 Orang | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | tenaga kerja yang disertifikasi | 16 orang | 16 Orang | | |
| | Meningkatnya kapasitas wirausaha berbasis inovasi, teknologi dan digitalisasi | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | laporan penelitian dan pengembana g bidang ekonomi dan pembangunan | 5 laporan | 5 laporan | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, | Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan | 1 dokumen | 1 dokumen | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|----------------|--|
| | | Perkebunan dan Pangan | n Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang tersusun | | | | |
| | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 2 laporan | 2 laporan | | |
| | | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi | 13 prototipe | 13 prototipe | | |
| | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Laporan Desiminasi | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | Rasion alisasi | |
| | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | Rasion alisasi | |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, 2023

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dibawah Pimpinan Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mampu membawa Provinsi NTB bersaing dengan sembilan provinsi untuk menjadi Provinsi Terinovatif dan Sangat Inovatif. Provinsi NTB berada pada posisi/ranking ke 5 (prediksi/sementara) pada Kategori Provinsi sangat inovatif dengan skor 84,21. Masuk nominator Provinsi dengan jumlah inovasi sebanyak 134 Inovasi. Diantaranya Inovasi Daerah sebanyak 171 merupakan usulan dari berbagai Perangkat Daerah, SMKN, BUMD, dan Masyarakat di Provinsi NTB yang terdiri atas 60 inovasi digital, 94 inovasi non digital, teknologi sebanyak 17 inovasi (37 inovasi dari masyarakat, 46 inovasi SMK se-NTB,

10 inovasi kepala daerah, dan 78 inovasi dari Pemerintah Provinsi NTB) dan dengan jumlah inovasi yang terkirim ke kemendagri sejumlah 134 inovasi.

Pj Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi menghadiri kegiatan presentasi Kepala Daerah Nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 pada klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal dan daerah perbatasan. Acara tersebut bertempat di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A Lt.3 Kemendagri dan Ruang Multimedia Gedung B Lt. 2) Jakarta, pada Senin 25 September 2023. Pj Gubernur NTB , memaparkan keunggulan NTB Mall dan 99 Desa Wisata sebagai inovasi unggulan Provinsi NTB. Inovasi-inovasi di daerah harus terus ditingkatkan dan dikembangkan. Agar menjadi inovasi daerah percontohan bagi daerah lain. Pj Gubernur NTB Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si selanjutnya menerima kunjungan dari tim Validasi Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Award 2023. NTB Mall dan 99 desa wisata menjadi fokus inovasi yang akan di validasi. NTB mall diharapkan terus ditingkatkan dan berjalan optimal untuk peningkatan ekonomi bagi UMKM masyarakat di NTB. Selain itu, NTB Mall mampu merambah pasar Nasional dan Mancanegara dengan membuka outlet di ibu kota negara DKI Jakarta dan di Malaysia. Hingga saat ini terdapat total 5.215 UMKM yang sudah bermitra dengan NTB Mall. Sementara Desa Wisata menjadi ikhtiar Pemprov NTB dalam memaksimalkan potensi sumberdaya alam serta mempromosikan unsur tersebut dengan menampilkan keaslian pedesaan didukung aktifitas sosial budaya masyarakat. Banyak desa-desa di NTB yang disulap menjadi desa yang indah dan menawan seperti Desa Bilebante, Desa Sade dan desa wisata lain di NTB yang sudah terkenal.

Pada Tahun 2023 Inovasi PePADU Plus terpilih menjadi salah satu inovasi yang berhasil lolos menjadi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk klaster umum. Kemudian, terpilih menjadi 20 inovasi yang memasuki tahap verifikasi dan observasi lapangan. Pj. Gubernur NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si menerima langsung penghargaan tersebut dari

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, M.Si. di Hotel Bidakara Jakarta. Inovasi PePADU Plus sebagai cara dan bentuk ikhtiar memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan DUDI dan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan tenaga kerja agar terserap ke dunia industri, sehingga investasi yang ada di NTB ini akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat NTB. Pemprov NTB berharap melalui PePADu Plus ini, 80 persen peserta pelatihan terserap bekerja ke dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri. Sisanya 20 persen, dimana 10 persen bisa melanjutkan pendidikan, dan 10 persen yang tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha, akses pemasaran dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha mandiri. Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam acara penerimaan penghargaan tersebut sebagai wujud pengakuan pemerintah pusat terhadap berbagai inovasi layanan publik di Pemprov NTB. Pemprov NTB sudah banyak melahirkan berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses atau mendapatkan berbagai pelayanan dari pemerintah

Sedangkan untuk program beasiswa Pada tahun 2023, pemerintah provinsi NTB juga memberikan beasiswa dalam negeri dengan total 2.235 orang yang terdiri dari beasiswa miskin berprestasi (BMB) 698, beasiswa stimulan khusus (BSK) 400 orang dan beasiswa stimulant unggulan (BSU) 1.108 orang dan juga beasiswa IIK kediri sebanyak 29 orang. Program, pendukung lainnya Youth Science Camp yang diikuti 250 peserta Siswa SMP, SMA, Guru dan Mahasiswa. Rumah Bahasa untuk pelatihan Bahasa Inggris diikuti oleh 400 peserta kelas GE, Toefl dan Ielts. Disamping itu juga dibuka program Brida School Academi kelas Coding.

Pengiriman mahasiswa NTB untuk belajar di luar negeri untuk tingkat pendidikan khususnya S2 dan S3 dimulai sejak tahun 2018 sampai saat ini ke beberapa universitas terbaik di beberapa negara tujuan, yaitu: Malaysia, China, Taiwan, Polandia, Ceko, Rusia, Hungaria, dll. Pada tahun 2019 and

2020 pemerintah China memberikan beasiswa penuh untuk total 11 mahasiswa S1 dan 4 mahasiswa S3 asal NTB untuk belajar di beberapa kampus ternama di China seperti China Agricultural University (Beijing), Huazhong University of Science and Technology, dll. Di tahun 2019 juga Beizing Wuze University memberikan beasiswa parsial (gratis biaya spp dan Pendidikan Bahasa) kepada 4 mahasiswa S1 asal NTB. Tahun 2020, LPPNTB bekerjasama dengan pemerintah Rusia dan mendapatkan beasiswa parsial (gratis biaya spp) kepada 3 mahasiswa S2 asal NTB. Albukhari International University (AIU) Malaysia juga memberikan beasiswa penuh pada tingkat pendidikan S1. Pada tahun 2022 sebanyak 20 orang dan tahun 2023 sebanyak 32 orang sebagai penerima beasiswa AIU yang diberangkatkan ke Malaysia. Sampai akhir 2023 tercatat 796 orang mendapatkan program Beasiswa NTB luar negeri baik degree untuk tingkatan S1/S2/S3 dan juga NonDegree.

1.3. Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan target 2023

Dalam rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tertuang Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama pembangunan 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 beserta indikatornya sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2023 :

| NO | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Target | Satuan | Target | Satuan | Target | Satuan |
| | TUJUAN | | | | | | | |
| | Terwujudnya Ekosistem Inovasi terintegrasi di Provinsi NTB | Indeks Inovasi Daerah | 75,67 | point | 75,67 | point | 76,00 | point |
| | SASARAN | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | Terimplementasinya rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah | Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah | 34,78 | % | 34,78 | % | 37,14 | % |
| 2 | Meningkatnya kapasitas sumber daya iptek daerah | Rasio kapasitas sumber daya iptek daerah | 180,56 | point | 183,56 | point | 186,56 | point |
| 3 | Meningkatnya kapasitas wirausaha berbasis inovasi, teknologi & digitalisasi | Persentase wirausaha berbasis inovasi, teknologi & digitalisasi | 3 | % | 24 | % | 30 | % |

1.4. Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian Nasional

Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 – 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai OPD penunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap pimpinan kepala daerah. Sehingga sasaran pembangunan nasional berbeda dengan tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.5. Analisis keberhasilan dan kegagalan capaian

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang kriteria penilaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 91 % ≤ 100% | Sangat memuaskan |
| 76 % ≤ 90 % | Memuaskan |

| | |
|-------------|-------------|
| 66 % ≤ 75 % | Sangat Baik |
| 51 % ≤ 65 % | Baik |
| ≤ 50 % | Cukup |

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2023 adalah 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja berkategori sangat memuaskan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.

- a. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai
- b. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023.
- b. Adanya sinergi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam mendukung pencapaian indikator pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi khususnya di sektor industrialisasi dimasa yang akan datang dengan menggerakkan sektor hilir dengan maksud agar sektor hulu tetap memproduksi walaupun tidak optimal. Penguatan sektor hulu dilakukan melalui pengadaan peralatan prototype-prototype mesin, pengadaan mesin pertanian, pengadaan mesin perikanan, serta sarana produksi lainnya.

1.6. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penganggaran dimana perekonomian yang melemah menuntut semua OPD untuk dilakukan, sebagian besar di pertengahan tahun telah dihimbau untuk pengaturan dalam rangka efisiensi anggaran tersebut. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dapat diefisiensi, yaitu pada pembelian belanja modal yang tidak menjadi prioritas, serta pembayaran listrik dan air yang disesuaikan dengan kebutuhan. karena dengan efisiensi anggaran akan menyelamatkan pendapatan asli daerah agar tidak terjadi hutang dikemudian hari.

1.7. Analisis Program Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah pada dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019–2023, telah disusun program unggulan/Major Project Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB yang dinilai strategis untuk mendukung kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kontribusi sektor penelitian dan pengembangan Provinsi NTB, sebagaimana tercantum pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2. Program Unggulan/Major Project Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB

| No. | Program Unggulan | Manfaat Proyek | Indikasi Pendanaan | OPD Pendukung |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Research Based Policy Industri peralatan/perm esinan (prototype) | Penerapan hasil Kajian/Penelitian dan pengembangan dalam pembangunan dan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi | APBD | Disprin, Disbud |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> Beasiswa NTB/NTB 1000 Cendekia | Peningkatan kualitas SDM melalui Beasiswa NTB | APBD | Disbud |

| | | | | |
|----|---|--|------|------------------|
| | ▪ Rumah Bahasa / Pelatihan Bahasa Asing | | | |
| 3. | ▪ Industrialisasi Unggul/ StartUP NTB | Mendukung pengembangan industri Pertumbuhan Start UP dan wirausaha bidang Teknologi Informasi/ Digitalisasi Kemitraan sektor untuk mendorong akses pembiayaan dan permodalan di Provinsi NTB | APBD | Disperin ,Dispar |

1. Research Based Policy

Pembangunan daerah yang berhasil berkontribusi pada keberhasilan pembangunan Nasional secara signifikan. Untuk itu, sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah menjadi langkah strategis dalam mengembangkan kebijakan daerah berbasis riset (research based policy). Kelembagaan yang dibentuk diharapkan dapat berperan secara efektif dan efisien meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Berikut rencana Penelitian dan Realisasi pada Tahun 2023 :

| Sub Kegiatan | Jumlah Kajian | | |
|--|---------------|------------|----------------|
| | Usulan | APBD Murni | APBD Perubahan |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 16 | 6 | 4 |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 2 | 1 | 1 |
| Hibah | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH | 27 | 14 | 9 |

Sumber : Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi NTB

Realisasi Anggaran Penelitian/Kajian Tahun 2023

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEG/RINCIAN KEGIATAN | PAGU (Rp) | SUMBER DANA | VOLUME | NILAI KONTRAK (Rp) |
|-----|---|-------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | PAD/DAU/DAK/DBH | | |
| 1 | Kajian pemanfaatan limbah batang tembakau virginia untuk pestisida nabati dan bricket | 100.000.000 | DBHCHT | 1 PAKET | 99.222.900 |
| 2 | Kajian pemanfaatan alat solar dryer pada proses pengeringan tembakau dgn menggunakan tenaga Surya , transformasi hijau menuju kawasan industri hasil tembakau yang berkelanjutan. | 75.000.000 | DBHCHT | 1 PAKET | 74.658.300 |
| 3 | Model Pengelolaan Pasca Panen Tembakau Virginia Kerjasama PT. Djarum dan Petani Tembakau Mitra di Lombok Timur | 75.000.000 | DBHCHT | 1 PAKET | 74.659.000 |
| 4 | Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multi Dimensi Untuk Diagnosa Intervensi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan | 100.000.000 | DBHCHT | 1 PAKET | 99.334.000 |
| 5 | study Penelitian Keputusan Pelanggan pada Pelayanan Air Minum di Kawasan Desa Wisata Gili Trawangan | 75.000.000 | DBHCHT | 1 PAKET | 74.847.000 |
| 6 | Kajian institusionalisasi inovasi/teknologi mendukung pembangunan daerah NTB | 75.000.000 | DBHCHT | 1 PAKET | 74.819.600 |
| 7 | Dampak KEK Mandalika Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota Se-Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat | 100.000.000 | PAD | 1 PAKET | 99.686.000 |

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|---------|------------|
| | | | | | |
| 8 | Keuntungan Aglomerasi KEK Mandalika Terhadap Peningkatan Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyediaan Lapangan Kerja Bagi 5 Kabupaten/Kota Se-Pulau Lombok Provinsi NTB | 100.000.000 | PAD | 1 PAKET | 99.030.000 |
| 9 | Analisis Dampak Aglomerasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Terhadap Kondisi Perekonomian dan Kemiskinan di Provinsi NTB | 75.000.000 | PAD | 1 PAKET | 74.762.000 |
| 10 | Pemetaan Potensi Desa Wisata Lombok Timur: Perspektif Daya Saing, Studi Kasus di Desa Seriwe & Desa Lenek Ramban Biak | 100.000.000 | PAD | 1 PAKET | 99.494.000 |
| 11 | Pengembangan Model Pembelajaran Proyek Kolaborasi Antar Mata Pelajaran IPA Berbasis Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Sikap Ilmiah. | 100.000.000 | PAD | 1 PAKET | 99.744.000 |
| 12 | Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove di Jerowaru, Lombok Timur | 100.000.000 | PAD | 1 PAKET | 99.520.000 |
| 13 | KAJIAN DAN PERANCANGAN PROTOTYPE ALAT PAKAN IKAN OTOMATIS BERBASIS INTERNET OF THINGS DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI NTB (STUDI KASUS DIKOLAM "AZIL GARDEN" NARMADA NTB) | 40.000.000 | HIBAH - PAD | 1 PAKET | 40.000.000 |
| 14 | KAJIAN INDEKS KESEHATAN TERUMBU KARANG DI DUSUN PANDANAN DESA MELAKA KEC. PEMENANG KAB. LOMBOK UTARA MENDUKUNG EKOWISATA BAWAH LAUT DI KLU | 40.000.000 | HIBAH - PAD | 1 PAKET | 40.000.000 |
| 15 | SURVEI LITERASI DIGITAL DI LOMBOK TIMUR | 40.000.000 | HIBAH - PAD | 1 PAKET | 40.000.000 |

| | | | | | |
|----|--|------------|-------------|---------|------------|
| | | | | | |
| 16 | PENYEBARAN KONTEN EDUKATIF DAN ANALITIK MEDIA KEGIATAN PRODUKTIF KAUM MUDA DI KAB. LOMBOK TIMUR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK | 40.000.000 | HIBAH - PAD | 1 PAKET | 40.000.000 |

2. Industri peralatan/permesinan (prototype)

Inovasi tidak hanya suatu pengembangan produk riset dan penciptaankreatifitas, namun inovasi merupakan suatu produk atau proses yang dapat memberikan manfaat atau kebaruan atau pengembangannya tidak hanya berhenti pada tahap prototype saja, inovasi dituntut menghasilkan sebuah produk atau proses yang mampu bersaing dan punya nilai secara komersial (commercialization process), sehingga dampak yang dihasilkan mampu mendorong atau menjadi penggerak perekonomian.

Dasar Hukum adanya inovasi itu sendiri yaitu, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Dana Insentif Daerah;
3. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Ruang lingkup kegiatan yaitu verifikasi, identifikasi prototype dan koordinasi dalam :

- Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi prototype yang sudah dihasilkan di Provinsi NTB.
- Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Start Up yang ada di Provinsi NTB, swasta, NGO dalam pengembangan prototype kedepannya.

Sedangkan Output dari kegiatan ini menghasilkan produk prototype inovasi daerah di Kaupaten/Kota Provinsi NTB yang bernilai ekonomis, dan berdaya saing selama satu tahun di tahun 2023 di Provinsi NTB.

1. Beasiswa NTB

Pengiriman mahasiswa NTB untuk belajar di luar negeri untuk tingkat pendidikan khususnya S2 dan S3 dimulai sejak tahun 2018 sampai saat ini ke beberapa universitas terbaik di beberapa negara tujuan, yaitu: Malaysia, China, Taiwan, Polandia, Ceko, Rusia, Hungaria, dll. Pada tahun 2019 and 2020 pemerintah China memberikan beasiswa penuh untuk total 11 mahasiswa S1 dan 4 mahasiswa S3 asal NTB untuk belajar di beberapa kampus ternama di China seperti China Agricultural University (Beijing), Huazhong University of Science and Technology, dll. Di tahun 2019 juga Beizing Wuze University memberikan beasiswa parsial (gratis biaya spp dan Pendidikan Bahasa) kepada 4 mahasiswa S1 asal NTB. Tahun 2020, LPPNTB bekerjasama dengan pemerintah Rusia dan mendapatkan beasiswa parsial (gratis biaya spp) kepada 3 mahasiswa S2 asal NTB. Albukhari International University (AIU) Malaysia juga memberikan beasiswa penuh pada tingkat pendidikan S1. Pada tahun 2022 sebanyak 20 orang dan tahun 2023 sebanyak 32 orang sebagai penerima beasiswa AIU yang diberangkatkan ke Malaysia. Sampai akhir 2023 tercatat 796 orang mendapatkan program Beasiswa NTB luar negeri baik degree untuk tingkatan S1/S2/S3 dan juga NonDegree.

Program Beasiswa NTB terbagi dalam dua kluster besar yaitu, Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus. Telah diterbitkan Pergub No.5 Tahun 2022 tentang Perubahan ke dua Peraturan Gubernur No 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa menetapkan bahwa Beasiswa Umum adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik dan/atau non akademik berdasarkan hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri. Program beasiswa yang tercakup dalam Beasiswa Umum ini adalah Beasiswa NTB. Beasiswa NTB terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- Kategori A, yaitu Beasiswa NTB fully funded;
- Kategori B, yaitu Beasiswa NTB partial funded;
- Kategori C, yaitu Beasiswa NTB untuk pelatihan, short course dan program pengembangan diri singkat yang diadakan di luar negeri.

2. Sertifikasi Profesi untuk SDM Pembuat Prototipe

Teknologi di bidang industri permesinan dan logam sangat berkembang dengan pesat terutama dalam perancangan dan desain produk. Pelaku industri (IKM) dituntut untuk dapat menguasai teknologi inovasi tidak terkecuali kemampuan di bidang las sehingga keunggulan kompetitif bisa diraih. Pemerintah menyadari bahwa kapasitas IKM dan Mutu Produk di bidang permesinan dan logam akan sangat bergantung dari sumber daya manusia di bidang pengelasan, karena dalam penerapannya konstruksi baja sangat bergantung pada proses penyambungan logam atau disebut dengan pengelasan

Umumnya pengelasan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelasan dengan las listrik dan pengelasan dengan las gas. Pengelasan las listrik merupakan pengelasan yang dilakukan dengan menggunakan pesawat las listrik Shielded Metal Arc Welding (SMAW). Proses pengelasan dengan menggunakan SMAW menghasilkan sambungan yang kuat dan mudah untuk digunakan (Hudiono & Santoso, 2020). Pengelasan metode SMAW juga merupakan pengelasan dengan elektroda terbungkus, metode ini sangat banyak digunakan karena pengelasan dengan metode SMAW sangat fleksibel dalam penggunaannya, baik itu pengelasan dengan posisi datar, horizontal dan vertikal.

Pelaksanaan Program kegiatan Sertifikasi Profesi SMAW LAS 3G difasilitasi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya IPTEK yang diikuti oleh 16 orang peserta. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pembukaan pendaftaran peserta dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu serta melakukan survei ke berbagai IKM yang ada di Provinsi NTB agar tersampainya kegiatan sertifikasi profesi ini kepada pelaku industri (LAS) yang ada di Nusa Tenggara Barat, disamping itu BRIDA NTB juga melaksanakan verifikasi IKM yang terdiri dari kapasitas produksi, SDM dan berbagai jenis perijinannya. Program Sertifikasi Ini dilaksanakan pada bulan Juni dan bekerjasama dengan LLK Selong sebagai tim pelaksana

pelatihan, sedangkan untuk asesor yang akan melaksanakan pengujian terhadap peserta langsung di datangkan dari Surabaya, dengan bekerjasama dengan LSP Surabaya, dimana pembukaan kegiatan Sertifikasdi Profesi SMAW LAS 3G dilaksanakan pada tanggal 6 juni. Dilanjutkan dengan pelatihan welding yang dilaksanakan selama 4 hari mulai dari tanggal 7 sd 10 juni. Dan untuk pengujian peserta oleh LSP Surabaya pada tanggal 11 juni

3. Industrialisasi Unggul/ StartUP NTB

BRIDA sebagai fasilitator Bisnis yang membantu Startup mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan Mentor yang dapat menambah Skill / Knowledge bisnis dari Startup tersebut. Membantu mencari jaringan networking bagi para Startup yang tergabung dalam Komunitas Startup BRIDA.

Komunitas startup BRIDA NTB terbagi menjadi 5 (lima) bagian :

1. Bidang Produk Olahan terdiri dari 35 startup;
2. Bidang Permesinan terdiri dari 5 startup;
3. Bidang Industri Kreatif terdiri dari 22 startup;
4. Bidang Teknologi Informasi terdiri dari 19 startup;
5. Bidang Agrobisnis terdiri dari 13 startup.

Total keseluruhan startup dalam komunitas BRIDA NTB adalah 94 startup. Proses Rekrutment Inkubasi Bisnis ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu :

1. Pendaftaran, yang mana para peserta mengisi G-Form untuk mendaftarkan diri;
 2. Setelah Data pendaftar terkumpul dilakukan proses seleksi administrasi;
 3. Setelah itu, dilakukan Seleksi Wawancara, yang mana hasil dari seleksi wawancara merupakan keputusan dan hasil final dari Tim Penilai. Tim penilai berasal dari praktisi bisnis dan akademisi yang tergabung dalam Tim Pengelola Lembaga Inkubator BRIDA NTB.
- Proses Selanjutnya yaitu Mentoring Inclass, yang diisi oleh beberapa Tim

- Mentor BRIDA NTB, yang berisikan beberapa pemaparan materi terkait perkembangan bisnis.
- Selanjutnya adalah mentoring Outclass. Mentor dan startup akan dipertemukan face to face sehingga memaksimalkan kegiatan mentoring.
- Setiap bulan startup (yang menjadi tenant BRIDA NTB) melaporkan kegiatannya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi.
- Setelah Tenant dinyatakan Lulus Seleksi wawancara, Tenant wajib menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BRIDA NTB.
- Sosialisasi Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Teknologi Tahun 2023

Kegiatan Sosialisasi Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Teknologi menggunakan metode pertemuan pemaparan materi oleh tim Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, dan diskusi. Peserta sosialisasi terdiri dari unsur:

1. OPD yang menangani Fungsi Litbang di Kabupaten/Kota;
2. OPD yang menangani Teknologi Tepat Guna di Kabupaten/Kota;
3. Kepala SMA / SMK sederajat;
4. Pos Yantek Kecamatan di Kabupaten/Kota;
5. Perguruan Tinggi.

Kegiatan Sosialisasi Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Teknologi dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Sumbawa Besar dengan jumlah peserta 25 orang;
2. Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah peserta 30 orang;
3. Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah peserta 25 orang;
4. Kabupaten Lombok Utara dengan jumlah peserta 20 orang.
5. Sosialisasi Eduwisata Keilmuan Dan Teknologi Tahun 2022

Kegiatan Sosialisasi Eduwisata Keilmuan dan Teknologi menggunakan metode pertemuan di lokasi yang ditetapkan, pemaparan materi oleh tim Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, dan diskusi. Peserta sosialisasi terdiri dari unsur:

1. Kepala Sekolah/Guru sekolah tiap tingkatan mulai dari PAUD/TK s.d SMA/SMK sederajat;

2. Perguruan Tinggi;
3. Masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi Eduwisata Keilmuan dan Teknologi BRIDA NTB akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran di seluruh Kabupaten/Kota se NTB.

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Eduwisata Keilmuan dan Teknologi dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan dua kegiatan utama yaitu: Fasilitas Kunjungan Eduwisata, dan Sosialisasi Program Eduwisata Keilmuan dan Teknologi.

1. Fasilitas Kunjungan Eduwisata
2. Target Pengunjung
3. Target kunjungan eduwisata di tahun 2022 sebanyak 2.000 pengunjung.
4. Realisasi

Realisasi capaian pengunjung pada tanggal 10 Januari 2023 s/d 21 desember 2023 sebanyak 11.093 pengunjung, mulai dari anak usia dini hingga kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

Tabel 3.3. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Tahun 2024

| PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|
| 5. Ekosistem Penelitian dan Inovasi belum terintegrasi. | 1. Perlu penguatan dari ketersediaan regulasi pendukung dari segi penelitian, |
| 6. Hasil kajian kelitbangan belum maksimal dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan. | 2. Dukungan komitmen stakeholder terkait dalam pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan, |
| 7. Pemanfaatan teknologi dan inovasi belum maksimal. | 3. Peningkatan sosialisasi dan edukasi baik normal dan non formal terhadap |

| | |
|---|---|
| 8. Kompetensi Sumber daya manusia belum maksimal. | <p>pemanfaatan teknologi yang dihasilkan,</p> <p>4. Peningkatan kompetensi SDM dengan Diklat Pendidikan dan Pelatihan melalui Program Beasiswa NTB.</p> |
|---|---|

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, 2023

B. Realisasi Anggaran

Total pagu Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP-APBD) yang dialokasikan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB tahun 2023 senilai Rp. 45.311.064.474,-. Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2023 untuk program/kegiatan/sub kegiatan utama dalam mendukung pelaksanaan Capaian Sasaran Kinerja yang telah diperjanjikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2023

| Kode Rek. Prog./Keg | Nama Prog/Keg. | Jumlah Anggaran (Rp) | Bobot (%) | Penyerapan Anggaran | | | Sisa Anggaran (Rp) |
|------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------|--------------------------|
| | | | | Realisasi (Rp) | Presentase s.d. Bulan ini | | |
| | | | | | Keu. | Fisik | |
| | | | | | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7,00 | 8 |
| 5.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 64.439.300 | 0,14 | 58.784.300 | 91,22 | 91,22 | 5.655.000 |
| 5.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.800.000 | 32,28 | 18.697.200 | 89,89 | 89,89 | 2.102.800 |
| 5.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 19.480.000 | 30,23 | 19.480.000 | 100,00 | 100,00 | - |
| 5.05.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 16.159.300 | 25,08 | 16.159.300 | 100,00 | 100,00 | - |
| 5.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000 | 6,21 | 2.000.000 | 50,00 | 50,00 | 2.000.000 |
| 5.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.000.000 | 6,21 | 2.447.800 | 61,20 | 61,20 | 1.552.200 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------|---------------|--------|--------|-------------|
| 5.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.062.188.834 | 10,98 | 4.227.622.356 | 83,51 | 83,51 | 834.566.478 |
| 5.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.039.620.834 | 99,55 | 4.206.054.356 | 83,46 | 83,46 | 833.566.478 |
| 5.05.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 22.568.000 | 0,45 | 21.568.000 | 95,57 | 95,57 | 1.000.000 |
| 5.05.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 7.381.700 | 0,02 | 6.671.700 | 90,38 | 90,38 | 710.000 |
| 5.05.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.675.300 | 63,34 | 3.965.300 | 84,81 | 84,81 | 710.000 |
| 5.05.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.706.400 | 36,66 | 2.706.400 | 100,00 | 100,00 | - |
| 5.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.346.390.040 | 2,92 | 949.339.419 | 70,51 | 74,55 | 397.050.621 |
| 5.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.472.000 | 3,75 | 44.172.000 | 87,52 | 87,52 | 6.300.000 |
| 5.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.441.750 | 1,22 | 16.441.750 | 100,00 | 100,00 | - |
| 5.05.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.318.090 | 1,88 | 25.318.090 | 100,00 | 100,00 | - |
| 5.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30.459.600 | 2,26 | 30.406.932 | 99,83 | 99,83 | 52.668 |
| 5.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 29.573.000 | 2,20 | 27.292.000 | 92,29 | 92,29 | 2.281.000 |
| 5.05.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 22.425.600 | 1,67 | 21.425.600 | 95,54 | 95,54 | 1.000.000 |
| 5.05.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 102.000.000 | 7,58 | 48.222.950 | 47,28 | 47,28 | 53.777.050 |
| 5.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 568.100.000 | 42,19 | 275.232.197 | 48,45 | 55,73 | 292.867.803 |
| 5.05.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 501.600.000 | 37,26 | 460.827.900 | 91,87 | 94,46 | 40.772.100 |
| 5.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 324.956.300 | 0,70 | 252.871.000 | 77,82 | 77,82 | 72.085.300 |
| 5.05.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.862.000 | 6,11 | 19.500.000 | 98,18 | 98,18 | 362.000 |
| 5.05.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 145.051.000 | 44,64 | 84.806.000 | 58,47 | 58,47 | 60.245.000 |
| 5.05.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 160.043.300 | 49,25 | 148.565.000 | 92,83 | 92,83 | 11.478.300 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|
| 5.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.955.184.300 | 6,41 | 2.819.547.952 | 95,41 | 95,41 | 135.636.348 |
| 5.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 549.501.100 | 18,59 | 452.587.952 | 82,36 | 82,36 | 96.913.148 |
| 5.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 675.522.000 | 1,46 | 345.915.521 | 51,21 | 51,21 | 329.606.479 |
| 5.05.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 108.000.000 | 15,99 | 107.998.630 | 100,00 | 100,00 | 1.370 |
| 5.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.250.000 | 4,18 | 19.799.891 | 70,09 | 70,09 | 8.450.109 |
| 5.05.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 539.272.000 | 79,83 | 218.117.000 | 40,45 | 40,45 | 321.155.000 |
| 5.05.02.1.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 821.000.000 | 1,78 | 802.661.940 | 97,77 | 98,04 | 18.338.060 |
| 5.05.02.1.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 721.000.000 | 87,82 | 707.443.979 | 98,12 | 98,43 | 13.556.021 |
| 5.05.02.1.01.13 | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | 100.000.000 | 12,18 | 95.217.961 | 95,22 | 95,22 | 4.782.039 |
| 5.05.02.1.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 33.348.167.300 | 72,31 | 28.467.726.581 | 85,37 | 87,26 | 4.880.440.719 |
| 5.05.02.1.02.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 968.790.000 | 2,91 | 914.522.204 | 94,40 | 96,35 | 54.267.796 |
| 5.05.02.1.02.03 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 31.986.103.500 | 95,92 | 27.296.397.035 | 85,34 | 87,25 | 4.689.706.465 |
| 5.05.02.1.02.05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 160.000.000 | 0,48 | 110.145.022 | 68,84 | 68,84 | 49.854.978 |
| 5.05.02.1.02.09 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | 233.273.800 | 0,70 | 146.662.320 | 62,87 | 63,54 | 86.611.480 |
| 5.05.02.1.03.02 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 185.000.000 | 20,13 | 175.190.005 | 94,70 | 97,94 | 9.809.995 |
| 5.05.02.1.03.04 | Penelitian dan Pengembangan | 549.000.000 | 59,74 | 544.830.700 | 99,24 | 99,24 | 4.169.300 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | |
| 5.05.02.1.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 595.007.000 | 1,29 | 380.367.257 | 63,93 | 68,01 | 214.639.743 |
| 5.05.02.1.04.02 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 335.007.000 | 56,30 | 212.931.957 | 63,56 | 63,56 | 122.075.043 |
| 5.05.02.1.04.04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 210.000.000 | 35,29 | 127.357.460 | 60,65 | 72,22 | 82.642.540 |
| 5.05.02.1.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 50.000.000 | 8,40 | 40.077.840 | 80,16 | 80,16 | 9.922.160 |
| | JUMLAH | 46.119.236.774 | 100,00 | 39.215.238.237 | 85,03 | 86,59 | 6.903.998.537 |

Secara umum seluruh kegiatan yang diprogramkan Tahun 2023 dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari hasil realisasi penyerapan APBD sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Program/kegiatan DPA-APBDP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2023 secara keseluruhan sebesar Rp. 39.215.238.237,- atau mencapai 85,03 % dengan perkembangan fisik 86,59%. Sisa anggaran APBD yang tidak dimanfaatkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 56.903.998.537,- atau sebesar 10,60% merupakan hasil efisiensi penggunaan anggaran yang selanjutnya dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BRIDA Provinsi NTB Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), sekaligus sebagai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. LKjIP BRIDA Provinsi NTB Tahun 2024 ini menggambarkan kinerja BRIDA Provinsi NTB dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai beserta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BRIDA Provinsi NTB sebagai berikut :

- 1) Ekosistem Penelitian dan Inovasi belum terintegrasi;
- 2) Hasil kajian kelitbangan belum maksimal dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan;
- 3) Pemanfaatan teknologi dan inovasi belum maksimal;
- 4) Kompetensi Sumber daya manusia belum maksimal;
- 5) Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program unggulan prioritas;
- 6) Tata kelola pemerintahan yang belum optimal, yang didalamnya terdapat fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Mutu dan Daya Saing Proses dan Hasil Pendidikan Belum Optimal dimana Fasilitas aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah;
- 8) Pertumbuhan Pertanian/Agribisnis dan Investasi relatif lambat, ditandai diantaranya oleh Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang.

4.2. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah di tahun berikutnya maka perlu dilakukan evaluasi, pemberian saran dan strategi untuk menyelesaikan tantangan dan untuk meningkatkan capaian kinerja, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan:

- a) Pertama, terkait Sosialisasi terkait Inovasi Daerah diperlukan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah untuk mengenalkan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Dengan tersebarnya informasi hingga ke masyarakat diharapkan berdampak pada hasil yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Bentuk pembinaan yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terkait inovasi daerah antara lain forum komunikasi, bimbingan teknis, fasilitasi kebijakan inovasi daerah, dan pendampingan terkait proposal maupun indikator inovasi;
- b) Kedua, proses penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) pada tahun 2023 adalah Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dengan validasi dokumen digital oleh Kemendagri, presentasi Kepala Daerah, Validasi Lapangan oleh Kemendagri, sidang tim penilai oleh Kemendagri, dan pengumuman pemenang dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023;
- c) Selain itu, diharapkan kerjasama dari seluruh stakeholders, utamanya para pengusaha swasta nasional maupun daerah NTB untuk berperan meningkatkan investasi pada industrialisasi di daerah maupun nasional. Kita harus mampu mengungguli daerah lainnya. Karena kita punya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan mumpuni dan kini saatnya untuk bisa mandiri menjadikan sebagai sumber ekonomi.

Sejauh ini ada beberapa hal yang telah kami lakukan terkait permasalahan yang kami hadapi di lapangan:

- a. Optimalisasi pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dan inovasi teknologi dalam pembangunan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya iptek mendukung pembangunan daerah.
- c. Optimalisasi inkubasi StartUP berbasis Teknologi Informasi/Digitalisasi mendukung Industri 4.0.
- d. Optimalisasi peran sumber daya aparatur peneliti.